

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII(2), 142–157. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Anjanni, I. L. P., Hampsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Lepatanan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Ariyo Dewantoro, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. www.djpkpd.go.id.
- Asalam, A. G., & Annisa, I. A. O. (2022). *The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.46254/AP03>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). *Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia Pjaaa*, 17 (7) (2020) 3056 *Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7).
- BPS Kota Batam. (2022). Kota Batam Dalam Angka 2022. *Badan Pusat Statistik Kota Batam*.
- BPS Kota Batam. (2023). Kota Batam Dalam Angka 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Batam*.
- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (A. Heri, Ed.; 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haerunnisa, M. S. A. M. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Riset Edisi XXV*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.

- Juliandi, A., Irfan, & Manurung Saprial. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press.
- Kurnia, Pratomo, D., & Gusti Raharja, D. (2021). *The Influence Of Capital Intensity And Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance (Study Of Food And Beverages Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange From 2010-2015)*. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1).
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- MEDIACENTER. (2022, November 17). Batam Kembangkan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah. *DISKOMINFO Kota Batam*.
- Muhammad Zulfikar. (2021). Pakar paparkan penyebab indeks kemandirian fiskal daerah rendah. *ANTARA Kantor Berita Indonesia*.
- Murti, G., Aini, A. S., Candraningtias, A. S., Kayladifah, S. A., & Puji, N. C. P. (2023). Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.10935>
- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya The Effect of Local Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence in The Government of Tasikmalaya City Yeti Apriliawati. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 196–206.
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Unit Penerbit & Perc Stim Ykpn.
- Rahman, A., & Altin, D. (2023). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Literatur Review: Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1).
- Rahmawati, E., & Gani Asalam, A. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, *Capital Intensity*, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3). www.pajak.go.id
- Robert D Ebel, & Serdar Yilmaz. (2002). *On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization* (Vol. 1). Policy Research Working Paper.
- Rusdin, T., Suharman, P. P., & Purnamasari, D. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Efitra & Sepriano, Eds.). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *PROSIDING BIEMA*, 2.
- Sudaryono Dr. (2018). *Metode Penelitian* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak* (A. O. Septiana, Ed.). Campustaka.
- Wibisono, A. D., Putra, A. B., Aprilyo, M. R., & Murti, G. T. (2023). Analysis of the Concept and Implementation of Local Taxes and Levies in Indonesia: Challenges and Impacts on Local Revenues. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 6(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>
- Ahmad, J., Blair, H., Esmail, T., Ford, J., Hofman, B., Kerr, G., King, E., Kolehmainen-Aitken, R.-L., Lutz, E., McLean, K., Rondinelli, D., Shah, A., Tommasi, G. De, & Wiest, D. (1999). *Decentralization Briefing Notes* (J. Litvack & J. Seddon, Eds.). World Bank Institute Working Papers.

Undang-Undang

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LN.2022/No.4. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. LN. 1999/ No. 72. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. LN. 1999/ No. 60. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LN. 2004/ No. 125. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. LN. 2004/ No. 126. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. LN. 2009/ No. 11. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ln.2007/NO.85. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. LN.2011/No. 82. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. LN. 2009/ No. 130. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang RENCANA TATARUANG WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2 0 0 4 - 2 0 1 4. LD.2004/No.52. Batam.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. LD 2024 (1)/NOREG (1,1/2024). Batam.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. LD.2021/No.1. Batam.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM. LD.2001/No.18. Batam.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM. LD.2003/No.30. Batam.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang PAJAK DAERAH. LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU: (7/46/2017). Batam.